

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN BELANJA MODAL
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (Studi pada Pemerintah Kota Bandung
Periode 2010 – 2018)**

Iseu Anggraeni

Ise.maheza@gmail.com

Rosa Fitriana

rosa.fitriana79@yahoo.com

Ferdi Agung Kusuma

ferdiagungkusuma@gmail.com

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah studi kasus pada Pemerintah Kota Bandung Periode 2010 – 2018. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan program *IBM SPSS Statistic 17*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung periode 2010 – 2018. Hal tersebut dibuktikan melalui uji F hasilnya F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu $13,182 > 5,14$ dengan nilai signifikan $0,0006$ lebih kecil dari $0,05$ ($0,0006 < 0,05$). Kemudian hasil analisis secara parsial didapat hasil bahwa Produk Domestik Regional Bruto secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah, hal tersebut dibuktikan dengan uji t Produk Domestik Regional Bruto memperoleh t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $3,113 > 2,446$ dengan nilai signifikansi $0,02$ lebih kecil dari $0,05$ ($0,02 < 0,05$) dan Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah, hal tersebut dibuktikan dengan uji t Belanja Modal memperoleh t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $0,371 < 2,446$ dengan nilai signifikansi $0,724$ lebih besar dari $0,05$ ($0,724 > 0,05$)

Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto, Belanja Modal, Penerimaan Pajak Daerah.

I. Pendahuluan

a. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah – daerah kabupaten dan kota. Tiap – tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk

Pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah| Iseu Anggraeni, Rosa Fitriana dan Ferdi Agung Kusuma

menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penetapan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang – Undang. Dengan demikian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang – Undang.

Untuk negara maju dan negara berkembang, pendapatan pajak adalah sumber utama bagi ekonomi keberlanjutan dan pertumbuhan. Bagi pemerintah pusat, penerimaan pajak adalah sumber pendapatan utama, bahkan untuk negara – negara yang bergantung pada bantuan dan berpenghasilan rendah. Tujuan perpajakan adalah untuk memenuhi kebutuhan publik dan pemerintah negara mana pun sangat membutuhkan pendapatan pajak untuk kesejahteraan ekonomi dan keadilan dalam masyarakat. Di banyak negara berkembang, tarif pajak lebih rendah menghentikan pemerintah untuk mendapatkan program pembangunan yang ambisius. Hal itu dianggap sebagai sumber pendapatan besar karena pajak dikumpulkan dari perusahaan, investor, dan dari warga negara untuk menghasilkan ekonomi.

Dalam rangka mendukung perkembangan daerah yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah perlu ditingkatkan lagi. Daerah diberi wewenang untuk menggali sumber dana yang sesuai dengan potensi dan keadaan daerah masing – masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah.

Definisi Pajak Daerah Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak mewakili kekuatan pendorong perekonomian yang membuat masing-masing negara lebih menarik untuk investasi. Ini membantu menciptakan pekerjaan baru dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan di negara dan membawa pendapatan pajak yang cukup untuk anggaran nasional. Namun, tidak mudah untuk menentukannya tingkat optimalnya.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan Penerimaan Pajak daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya digambarkan oleh pertumbuhan produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB telah menjadi pendekatan model yang sering digunakan banyak negara sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan, ekonomi penduduk, sehingga ada kecenderungan pendapatan penduduk meningkat. Jika pendapatan penduduk meningkat, maka akan mengubah pola konsumsinya yang kemudian akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Selama periode tahun 2014 – 2018 pertumbuhan ekonomi Kota Bandung berada dibawah 7 persen, pertumbuhan yang cukup tinggi dan diatas rata – rata pertumbuhan ekonomi nasional maupun Jawa Barat, dimana pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada dikisaran 5 persen. Pada periode tersebut pertumbuhan ekonomi Kota Bandung pada masing – masing tahun adalah 7,72 persen (2014); 7,64 persen (2015); 7,79 persen (2016); 7,21 persen (2017); dan 7,08 persen (2018).

Dalam Peraturan Pemerintah no 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 Ayat (7) huruf c disebutkan bahwa Belanja Modal (*capital expenditure*)

adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat selain itu juga kota Bandung secara geografis juga berada di tengah Jawa Barat yang menjadi peran penting dalam perekonomian Jawa Barat.

Berdasarkan pernyataan diatas, di temukan bahwa penerimaan pajak belum optimal. Pendapatan pemerintah akan meningkat apabila Produk Domestik Regional Bruto terus meningkat. Belanja Modal juga akan ikut mempengaruhi penerimaan pajak, pembangunan kepada publik juga akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dalam bekerja dengan bertambahnya produktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul “ **PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN BELANJA MODAL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH**”.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2010 – 2018?
2. Bagaimana Pengaruh Belanja Modal secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2010 – 2018?
3. Bagaimana Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal secara bersama – sama terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2010 – 2018?

c. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bale Bandung. Disamping itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan serta pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis:

1. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2010 – 2018.
2. Pengaruh Belanja Modal secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2010 – 2018.
3. Pengaruh Pengaruh Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal secara bersama – sama terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung Tahun 2010 – 2018.

Pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah| Iseu Anggraeni, Rosa Fitriana dan Ferdi Agung Kusuma

d. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis.
Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pajak – pajak daerah baik secara teori maupun praktik.
2. Bagi pemerintah Kota Bandung, khususnya Badan Pusat Statistik Kota Bandung dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.
Penelitian ini dapat memberikan masukan atau saran dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan pajak Kota Bandung dan menentukan kebijakan apa saja yang terkait dalam menyelesaikan permasalahan pajak daerah kota Bandung.
3. Bagi Perguruan Tinggi.
Penelitian dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi mengenai Perpajakan khususnya untuk mengkaji topik – topik yang berkaitan dengan pajak daerah.
4. Bagi Pihak Lain.
Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan, perbandingan, sumbangan pemikiran, dan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian lebih lanjut.

II. Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis

a. Pengertian Akuntansi

Pengertian Akuntansi menurut Hery, mengemukakan bahwa secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem informasi yang memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi atau kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholders*) terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Akuntansi juga sering dianggap sebagai bahasa bisnis, dimana informasi bisnis dikomunikasikan kepada *stakeholders* melalui laporan akuntansi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, pengertian Akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisa, dan mengkomunikasikan transaksi atas kejadian ekonomi suatu entitas bisnis, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan.

b. Pengertian Pelaporan Keuangan Akuntansi Pemerintahan

Menurut Halim, Pengertian Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak – pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan.

Menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem akuntansi pemerintah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

c. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan diwilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non residen.

d. Pengertian Belanja Modal

Dalam Peraturan Pemerintah no 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26 Ayat (7) huruf c disebutkan bahwa Belanja Modal (*capital expenditure*) adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Belanja Modal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 50 huruf c didefinisikan Belanja Modal sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

e. Pengertian Pajak Daerah

Rochmat Soemitro, memberikan definisi Pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan Undang – Undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan dapat digunakan untuk membiayai pembangunan.

Menurut Mardiasmo, Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang – undangan yang berlaku digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dijelaskan dalam pasal 1 ayat (10) Undang – Undang No. 28 tahun 2009 bahwa: Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

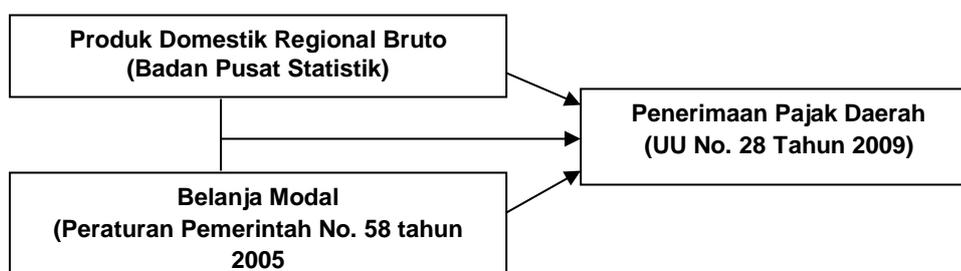
f. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan.

Selanjutnya menurut Muhamad, kerangka berpikir adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.

Menurut Ridwan, mengemukakan bahwa kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari fakta – fakta, observasi dan telaah penelitian. Kerangka pikir memuat teori, dalil, atau konsep – konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian dalam kerangka berpikir ini menjelaskan antar variabel.

Berikut bagan paradigma penelitian:



Gambar 1
Paradigma Penelitian

Pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah| Iseu Anggraeni, Rosa Fitriana dan Ferdi Agung Kusuma

g. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan Judul Penelitian dan konsep hipotesis diatas, maka penulis mengemukakan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Terdapat Pengaruh Antara Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
2. Terdapat Pengaruh Antara Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
3. Terdapat Pengaruh Antara Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal Secara Bersama Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

III. Objek dan Metode Penelitian

a. Objek Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian yang harus diperhatikan yaitu objek penelitian yang akan diteliti. Dimana terdapat masalah – masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari permasalahannya. Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis mendefinisikan

“Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu tergantung sesuatu hal objektif, valid dan *reliable* tentang sesuatu hal (variabel tertentu).”

Objek penelitian ini dalam penyusunan skripsi ini adalah pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Sumber data yang diperlukan adalah Laporan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha tahun 2010 – 2018 dan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung Periode 2010 – 2018.

b. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, Metode Penelitian diartikan sebagai

“cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”

Metode penelitian ini meliputi model dan operasionalisasi variabel, dimana model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian deksriptif dan verifikatif yaitu untuk mengetahui perkembangan dan pengaruh X_1 dan X_2 terhadap Y baik secara masing – masing maupun secara bersama – sama.

Sedangkan operasionalisasi variabel merupakan definisi mengenai variabel – variabel penelitian yang diambil dari teori kepustakaan dan merupakan teori penghubung dari juud yang diteliti, sebagai berikut:

Tabel 1
Operasionalisasi variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator Variabel	Skala
Variabel bebas (X_1): Produk Domestik Regional Bruto	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan diwilayah domestik. (Badan Pusat Statistik)	Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha.	Rasio

Variabel	Konsep Variabel	Indikator Variabel	Skala
Variabel bebas (X ₂): Belanja Modal	Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/ pengadaan asset tetap lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	1. Belanja Modal Tanah 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Penjarangan 5. Belanja Modal Fisik lainnya.	Rasio
Variabel terikat (Y): Penerimaan Pajak Daerah	Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).	1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak Parkir; 7. Pajak Air Tanah; 8. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan 9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan.	Rasio

c. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen, untuk mengetahui keadaan naik turunnya variabel yang diteliti.

Begitupun seperti yang telah dikemukakan oleh Sugiyono dalam bukunya “Statistika Untuk Penelitian” yang mengemukakan bahwa

“Analisis regresi ganda digunakan bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik/turunnya) variabel independen, nilai dua atau lebih variabel independen sebagai faktor *predictor* di manipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi berganda akan dilakukan bila jumlah variabel independen nya minimal 2”.

Bila dijabarkan secara sistematis, bentuk persamaan dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Gambar 2

Rumus Analisis Regresi Linier Berganda

Sumber : Sugiyono

Pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah| Iseu Anggraeni, Rosa Fitriana dan Ferdi Agung Kusuma

Keterangan:

- Y = Variabel terikat (Penerimaan Pajak Daerah)
X₁ = Variabel Bebas (Produk Domestik Regional Bruto)
X₂ = Variabel bebas (Belanja Modal)
a = Bilangan konstanta, yaitu besarnya nilai Y ketika nilai X₁, X₂ = 0
b₁, b₂ = koefisien regresi

2. Analisis Koefisien Korelasi

Korelasi pada dasarnya merupakan nilai yang menunjukkan terjadi adanya hubungan antara dua variabel atau lebih serta besarnya hubungan tersebut. Analisis koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan sebab akibat yang terjadi antara X₁ dan X₂ terhadap Y.

3. Koefisien Determinasi

Setelah koefisien korelasi ganda (R) diketahui serta untuk membuktikan hasil pengaruh secara simultan, maka selanjutnya adalah menghitung koefisien determinasi dengan rumus sebagai berikut:

$$KD = R^2 \cdot 100\%$$

Gambar 3
Rumus Koefisien Korelasi

Sumber: Ghazali

Keterangan:

- KD = Koefisien Determinasi
R² = Koefisien Korelasi Dikuadratkan

Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah:

1. Jika KD mendekati nol (0), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah.
2. Jika KD mendekati satu (1), maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat.

d. Pengujian Hipotesis

Menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,

“hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.”

Hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis nol (H₀) adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik (data sampel) sedangkan Hipotesis alternatif (H_a) adalah pernyataan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Maka H₀ tidak terdapat pengaruh yang signifikan dan H_a menunjukkan adanya dampak antara variabel bebas dan variabel terikat. Hipotesis yang dirumuskan dapat diuji melalui pengujian hipotesis berikut ini:

1. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t statistik digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh produk domestik regional bruto dan belanja modal terhadap penerimaan pajak daerah, secara individu. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} .

Untuk mencari nilai t_{hitung} maka pengujian tingkat signifikannya adalah dengan menggunakan rumus yang dikemukakan menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Statistika Untuk Penelitian, adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{rp\sqrt{n-3}}{\sqrt{1-rp^2}}$$

Gambar 4
Rumus Uji Signifikan Parsial

Sumber: Sugiyono

Keterangan:

rp = Korelasi Parsial

n = Banyaknya sampel

Setelah menghitung nilai t_{hitung} , selanjutnya bandingkan dengan nilai t_{tabel} dengan menggunakan kriteria pengujian berikut:

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
- 3) Apabila menggunakan program komputer (*Software SPSS*), jika nilai sig $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

Kemudian membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat apakah produk domestik regional bruto dan belanja modal bersama – sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Untuk mengetahui statistik uji adalah sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2/K}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

Gambar 5
Rumus Uji Signifikan Simultan
Sumber: Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian

Keterangan:

R^2 = Koefisiensi korelasi ganda

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah Anggota Sampel

dk = (n-k-1) derajat kebebasan.

Kriteria pengujian dengan membandingkan F_{hitung} dan F_{tabel} yaitu:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh).
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak (tidak berpengaruh).
- 3) Apabila menggunakan program komputer (*Software SPSS*), jika nilai sig $< \alpha = 0,05$ maka H_0 ditolak.

Kemudian membuat kesimpulan mengenai diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan.

IV. Hasil Penelitian dan pembahasan

Pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah| Iseu Anggraeni, Rosa Fitriana dan Ferdi Agung Kusuma

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-149.623	57.015		-2.624	.039
PDRB	17.918	5.756	.826	3.113	.021
Belanja_Modal	.224	.603	.098	.371	.724

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak

Sumber: Pengolahan data dengan *IBM SPSS Statistic 17*

Dari data diatas dapat dibuat persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = -149,623 + 17.918 X_1 - 0.224 X_2$$

Keterangan:

- Y = Penerimaan Pajak Daerah
- X₁ = Produk Domestik Regional Bruto
- X₂ = Belanja Modal

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar -149,623
Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel independen ditiadakan atau penerimaan Produk Domestik Regional Bruto (X₁) dan Belanja Modal (X₂) nilainya 0, maka Penerimaan Pajak Daerah (Y) adalah -149,623.
2. Koefisien regresi penerimaan Produk Domestik Regional Bruto sebesar 17,918
Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah yang artinya jika nilai variabel Produk Domestik Regional Bruto (X₁) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan kenaikan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 17,918 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Koefisien regresi Belanja Modal (X₂) sebesar 0,224
Hal ini menunjukkan indikasi adanya hubungan yang searah yang artinya jika nilai variabel Belanja Modal (X₂) naik 1% (0,01) maka akan menyebabkan penurunan Penerimaan Pajak Daerah sebesar 0,224 dengan asumsi variabel lain tetap.

2. Analisis Koefisien Korelasi

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Korelasi Parsial Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Correlations

Control Variables		PDRB	Penerimaan_Pajak
Belanja_ PDRB Modal	Correlation	1.000	.786
	Significance (2-tailed)	.	.021
	Df	0	6
Penerimaan_Pajak	Correlation	.786	1.000
	Significance (2-tailed)	.021	.
	Df	6	0

Sumber: Pengolahan Data dengan IBM SPSS Statistic 17

Tabel 4

Uji Koefisien Korelasi Parsial Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Correlations

Control Variables			Belanja_Modal	Penerimaan_Pajak
PDRB	Belanja_Modal	Correlation	1.000	.150
		Significance (2-tailed)	.	.724
		Df	0	6
Penerimaan_Pajak	k	Correlation	.150	1.000
		Significance (2-tailed)	.724	.
		Df	6	0

Sumber: Pengolahan Data dengan IBM SPSS Statistic 17

Tabel 5

Hasil Uji Korelasi Secara Simultan (R)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.903 ^a	.815	.753	32.23137	2.171

a. Predictors: (Constant), Belanja_Modal, PDRB

b. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak

Sumber: Pengolahan Data dengan IBM SPSS Statistic 17

Dilihat dari hasil perhitungan koefisien korelasi diatas, menunjukan bahwa:

- Korelasi Produk Domestik Regional Bruto (X_1) terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) adalah sebesar 0,786 yang berarti terhadap korelasi positif yang menunjukan hubungan kedua variabel tersebut secara searah, artinya jika Produk Domestik

Pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah| Iseu Anggraeni, Rosa Fitriana dan Ferdi Agung Kusuma

Regional Bruto naik maka Penerimaan Pajak Daerah akan mengalami kenaikan. Interval koefisien dari perhitungan diatas menunjukkan angka 0,786. Jika melihat interval koefisien angka 0,786 berada diantara 0,60 – 0.799 yang berarti variabel X_1 mempunyai hubungan yang kuat dengan variabel Y.

- b. korelasi Belanja Modal (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) adalah sebesar 0.150 yang berarti terdapat korelasi positif yang menunjukkan hubungan kedua variabel tersebut secara searah, interval koefisien dari perhitungan diatas menunjukkan angka 0.150. jika melihat interval koefisien angka 0.150 berada diantara 0,00 – 0,199 yang berarti variabel X_2 mempunyai hubungan yang sangat rendah dengan variabel Y.
- c. Korelasi ganda antara Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal secara simultan dengan Penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar 0,903, nilai tersebut sama dengan nilai koefisien korelasi secara simultan (bersama – sama) antara variabel X_1 dan X_2 terhadap Y. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan antara Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal secara simultan adalah searah, artinya jika Produk Domestik Regional Bruto dan belanja Modal naik maka Penerimaan Pajak Daerah pun akan meningkat. Jika melihat pada interval koefisien, angka 0,902 berada diantara 0,80 – 1,00 yang berarti variabel X_1 dan X_2 memiliki hubungan yang sangat kuat dengan variabel Y.

3. Koefisien Determinasi

Tabel 6
Hasil Uji Korelasi Secara Simultan (R Square)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.903 ^a	.815	.753	32.23137	2.171

a. Predictors: (Constant), Belanja_Modal, PDRB

b. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak

Sumber: Pengolahan Data dengan *IBM SPSS Statistic 17*

Dari tabel diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,815. Nilai R Square menunjukkan nilai koefisien determinasi . jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai KD = 0,815 (81%). Yang berarti, Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung pada pada periode 2010 – 2018 dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal sebesar 81%.

4. Pengujian Hipotesis

- a. **Pengaruh Secara Parsial Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah**

Tabel 7
Hasil Uji t Produk Domestik Regional Bruto (X₁) dan Belanja Modal (X₂)
terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-149.623	57.015		-2.624	.039
PDRB	17.918	5.756	.826	3.113	.021
Belanja_Modal	.224	.603	.098	.371	.724

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak

Sumber: Pengolahan Data dengan *IBM SPSS Statistic 17*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel Produk Domestik Regional Bruto adalah sebesar 3,113 dengan signifikansi 0,021 sedangkan t_{tabel} dengan dk 6 ($n - 3 = 9 - 3$) adalah 2,446 dan taraf signifikan 0,05. Mengacu pada kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika t_{hitung} lebih besar daripada t_{tabel} ($3,113 > 2,446$) atau taraf signifikansi (0,02) lebih kecil daripada 0,05 maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Bandung periode 2010 – 2018.

Produk Domestik Regional Bruto mencerminkan pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi disuatu wilayah, jika nilai PDRB lebih besar menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga tinggi. Selain itu, peran dari satu sektor ekonomi menunjukkan bahwa potensi atau basis perekonomian disuatu wilayah mendorong untuk membayar pajak daerah.

b. Pengaruh Secara Parsial Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Tabel 8
Hasil Uji t Produk Domestik Regional Bruto (X₁) dan Belanja Modal (X₂)
terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-149.623	57.015		-2.624	.039
PDRB	17.918	5.756	.826	3.113	.021
Belanja_Modal	.224	.603	.098	.371	.724

a. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak

Sumber: Pengolahan Data dengan *IBM SPSS Statistic 17*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel bebas Belanja Modal adalah sebesar 0,371 dengan signifikansi 0,724 sedangkan t_{tabel} dengan dk 6 ($n - 3 = 9 - 3$) adalah 2,446 dan taraf signifikansi 0,05. Mengacu pada

Pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah| Iseu Anggraeni, Rosa Fitriana dan Ferdi Agung Kusuma

kriteria pengambilan keputusan dan hasil perhitungan diatas terlihat jika t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} ($0.371 < 2,446$) dan taraf signifikansi X_2 ($0,724$) lebih besar daripada $0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Bandung periode 2010 – 2018.

Belanja Modal menurun maka Penerimaan Pajak Daerah juga akan mengalami penurunan, begitu juga sebaliknya. Pengeluaran pemerintah dalam hal pembangunan prasarana guna melancarkan kegiatan ekonomi masyarakat akan berdampak pada peningkatan penerimaan pemerintah.

c. Pengaruh Secara Simultan Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Tabel 9
Hasil Uji F Produk Domestik Regional Bruto (X_1) dan Belanja Modal (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y)

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	27389.053	2	13694.527	13.182	.006 ^a
Residual	6233.169	6	1038.861		
Total	33622.222	8			

a. Predictors: (Constant), Belanja_Modal, PDRB

b. Dependent Variable: Penerimaan_Pajak

Sumber: Pengolahan Data dengan *IBM SPSS Statistic 17*

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} adalah 13,182 sedangkan F_{tabel} dapat diperoleh dengan tabel F derajat bebas yaitu residual 6 dan regresi 2 dengan taraf signifikan 0,006, sehingga diperoleh F_{tabel} sebesar 5,14. Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima. Artinya kedua variabel bebas yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Dari tabel ANOVA^b diatas dapat dilihat nilai signifikansi Uji-F sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,050 maka keputusan yang diambil dengan nilai signifikansinya bahwa Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Hal ini disebabkan oleh naik turunnya sumber pada Pajak Daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air dan Tanah, serta BPHTB.

V. Simpulan Dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan analisis dan pemaparan yang telah peneliti bahas sebelumnya, maka peneliti mendapatkan simpulan sebagai berikut:

- a. Dari hasil analisis uji pengaruh parsial antara Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan Pajak Daerah menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto mempunyai pengaruh signifikan. PDRB menjadi pendekatan model yang sering digunakan banyak daerah sebagai tolak ukur tingkat kesejahteraan, ekonomi penduduk, sehingga ada kecenderungan pendapatan penduduk meningkat. Jika pendapatan penduduk meningkat, maka akan mengubah pola konsumsinya yang kemudian berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
- b. Variabel Belanja Modal tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung periode 2010 – 2018. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis uji parsial variabel Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Pengalokasian Belanja Modal relatif kecil dengan belanja barang dan jasa. Belanja Modal infrastruktur berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi dan penambahan aset daerah.
- c. Secara simultan, variabel bebas Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah yang merupakan variabel terikat. Artinya jika Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal meningkat maka Penerimaan Pajak Daerah juga ikut meningkat.

2. Saran

Adapun saran dari penulis berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Produk Domestik Regional Bruto mempunyai pengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah, maka dari itu Pemerintah Kota Bandung harus lebih meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto tersebut untuk dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung.
- b. Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah, dengan demikian bahwa porsi Belanja Modal yang relatif kecil. Diharapkan kedepannya dapat meningkatkan alokasi belanja modal untuk kepentingan publik sesuai komponen belanja modal dan lebih memanfaatkan potensi daerahnya.
- c. Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya dalam Penerimaan Pajak Daerah harus dilaksanakan secara terus menerus oleh semua pihak dalam pemerintah daerah dengan cara sosialisasi kepada masyarakat tentang ketaatan membayar pajak tepat waktu dan sensus pajak, agar Penerimaan Pajak Daerah tersebut terus meningkat melalui penggalian potensi daerah.
- d. Untuk peneliti selanjutnya, perlu adanya penelitian lanjutan untuk dimana bukan hanya produk domestik regional bruto dan belanja modal, tetapi menambahkan variabel lain di luar penelitian ini seperti Inflasi, pendapatan perkapita, Bahan Galian Golongan C, Jumlah Pengunjung Objek Wisata, Jumlah Industri, Tingkat Hunian Kamar Hotel, Jumlah Penduduk, Investasi Swasta, Realisasi PAD, Retribusi Daerah, Investasi Industri, Jumlah Tenaga Kerja. Disarankan juga untuk menggunakan unit analisis, populasi, dan sampel yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya baik oleh peneliti maupun peneliti – peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

Pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah| Iseu Anggraeni, Rosa Fitriana dan Ferdi Agung Kusuma

- Andrejovska, Alenna. 2018. Tax Revenue in the Context of Economic Determinants. *Montenegrin Journal of Economics, Faculty of Economics, Technical University of kosice, Slovak Republic*.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. 2019. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Bandung Menurut Pengeluaran 2014 - 2018*. Bandung: Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung. 2019. *Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2014 - 2018*. Bandung: Badan Pusat Statistik Kota Bandung.
- Basheer, Muhammad Farhan. 2018. Impact of Economic and Financial Factors on Tax Revenue: Evidence From the Middle East Countries. *School of Economic Banking and Finance, University of Utara Malaysia*.
- Biduri, Sarwenda. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hery. 2013. Akuntansi Dasar 1 dan 2. Jakarta: PT Grasindo.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2019. Modul Level Dasar (CAFB) Akuntansi Keuangan. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2018. Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan SKPD. Jakarta: Kementerian keuangan Republik Indonesia.
- Nordiawan, Deddi. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Nusa, Nabella Duta. 2016. Akuntansi Pengantar 1. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purwadinata, Jaya. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Akurat. Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Bale Bandung*, 34.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmi, Namira Ulfa. 2018. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Deepublish.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah no 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah .

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2017. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.